

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur perdesaan oleh masyarakat desa Citapen mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2015 yang pemanfaatannya masih jauh dari harapan masyarakat. Berdasarkan observasi dilapangan yang peneliti dapatkan bahwa kondisi pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal dikarenakan:

- Komunikasi dengan masyarakat minimnya waktu untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah daerah menjadi kendala yang menyebabkan terdapatnya informasi yang terhambat sehingga masyarakat kurang mengetahui isi dan kebenaran informasi kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya menimbulkan opini negative tentang isi kebijakan maupun pelaksanaannya.
- Sumberdaya manusia berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan oleh Desa Citapen.
- Disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari program peningkatan infrastruktur perdesaan. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan. namun kiranya masih banyak yang perlu

disempurnakan oleh kepala Desa Citapen, khususnya ketersediaan SDM yang memadai sesuai kebutuhan program peningkatan Infrastruktur Perdesaan.

- Struktur Birokrasi untuk pembagian kewenangan dalam pelaksanaan peningkatan Infrastruktur Perdesaan Pemerintah Desa Citapen telah mengeluarkan aturan kebijakan sebagaimana dalam Keputusan Kepala Desa No. 09/IV/DS Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dari peningkatan infrastruktur perdesaan Tahun Anggaran 2017 di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
2. Dalam pelaksanaan program peningkatan infrastruktur perdesaan di Desa Citapen terdapat faktor penghambat. penyelenggaraan Program Infrastruktur Perdesaan Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat adalah anggaran yang dikucurkan pemerintah tidak memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur perdesaan , menurunnya dan rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan, kurangnya ketersediaan lahan dalam meningkatkan SDM dan pendapatan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan sedikitnya swadaya masyarakat.
  3. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Citapen untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan program peningkatan infrastruktur perdesaan pada tahun 2017 antara lain:

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara infrastruktur perdesaan dan meningkatkan pendidikan perangkat desa maupun aparatur pemerintah desa agar tidak terjadinya miss communication dalam penyampaian atau penyuluhan bimbingan teknis dalam peningkatan infrastruktur perdesaan. Dan juga mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi aparat pemerintah desa tentang bagaimana memelihara infrastruktur perdesaan yang baik. Peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam pembangunan desa ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan desa dalam aspek fisik.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Teoritis**

- a. Dalam Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat masih menyisakan faktor lain untuk penelitian di bidang yang berbeda di luar implementasi kebijakan. Penelitian pada tinjauan implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang Program peningkatan infrastruktur perdesaan di Desa Citapen Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat merupakan variabel krusial (penting) untuk melengkapi model implementasi kebijakan, agar program pemerintah tidak sekedar mengejar terpenuhinya nilai ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya, tetapi secara objektif memiliki nilai yang sempurna

untuk meningkatkan kualitas program Infrastruktur perdesaan bagi kepentingan masyarakat lokal di masa kini dan masa yang akan datang.

- b. Penelitian lanjutan melalui variabel yang sama dengan menambah variabel lain serta pendekatan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan bidang kajian Ilmu Pemerintahan. Kepemimpinan yang baik dalam program Peningkatan infrastruktur perdesaan merupakan langkah penting dalam pengelolaan anggaran desa dan pelayanan umum, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pembangunan infrastruktur perdesaan di daerah. Dimana maksud dari kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

### **5.2.2. Praktis**

1. Bagi Pemerintah, baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program pembangunan desa kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kegiatan program peningkatan infrastruktur perdesaan , rapat-rapat dan penyuluhan.
2. Harus lebih dikembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, melalui proses dialog, yaitu persiapan kerjasama, penentuan arah kebijakan secara bersama-sama masyarakat, dan pembentukan kemitraan, pertemuan bersama dalam rangka pemecahan masalah dan

lebih aktif memberdayakan masyarakat agar menjadi manusia yang mandiri.

3. Sebaiknya bagi Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa berusaha bersikap lebih optimis, responsif, dan bersikap lebih loyal antar pegawai serta memberikan penghargaan yang lebih memadai terutama dalam mendukung kegiatan peningkatan infrastruktur perdesaan. Yang utama harus bersikap transparan, agar tidak terjadi spekulasi negatif mengenai penggunaan dana bantuan infrastruktur perdesaan.
4. Agar peningkatan infrastruktur perdesaan berjalan optimal dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka direkomendasikan adanya koordinasi antara pemerintah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan pelaksana kegiatan, dengan masyarakat lokal.